

LEKSIKON SEBAGAI SARANA PEMBUAT KLASIFIKASI: KAJIAN AWK DALAM BERITA KONFLIK PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

Fransisca Dwi Harjanti

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
fransisca_dwiharjanti@yahoo.com

Abstrak: *Tulisan ini meneliti penggunaan leksikon sebagai alat kekuasaan untuk melakukan praktik marginalisasi terhadap kelompok lain. Salah satu peran leksikon dalam bahasa berita adalah untuk membuat klasifikasi. Dengan klasifikasi, kita dapat melihat bentuk-bentuk leksikon yang menunjukkan perilaku pro dan kontra. Data dalam penelitian ini diambil dari media masa Press. Yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah surat kabar Kompas, Jawa Post, Republika and Media Indonesia. Pada tulisan ini, terlihat bahwa leksikon yang digunakan sebagai alat membuat klasifikasi dapat menjadi berbeda peran sebagai pro dan kontra. Leksikon yang menunjukkan perilaku kontra digunakan untuk mendekomposisi terhadap kelompok yang lain, sedangkan yang menunjukkan perilaku pro digunakan untuk memfasilitasi maksud dari kelompok yang lain dan meletakkan kelompok mereka sendiri pada posisi tersudut. Beberapa merupakan leksikon yang digunakan untuk membuat klasifikasi dan beberapa yang lain digunakan untuk adu wacana.*

Kata Kunci: *analisis wacana kritis, kosakata, klasifikasi*

Abstract: *This writing research the using of lexicon as the power mean to do marginalization practice to other group. One of lexicon role in in news language is classification made. With classification, we can see the forms of lexicon that showed pro and contra attitude The data is taken from press mass media that is used as the source of this research are Kompas, Jawa Pos, Republika, and Media Indonesia. On this writing is showed that lexicon as a mean which made classification can be difference as a pro and contra. Lexicon that showed contra attitude is used to decomposition to other group, while the attitude is used to provide the interest of the other group and put their group it self into a corner. Some is lexicon which is used to make classification, some of them is used to discourse fight.*

Keywords: *critical discourse analysis, lexicon, klassification*

PENDAHULUAN

Secara umum fungsi bahasa dipahami sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun tulis. Sebagai alat komunikasi, bahasa dalam berita

digunakan untuk menyampaikan pesan yang berisi kejadian atau peristiwa. Agar pesan yang disampaikan wartawan dapat dimengerti oleh masyarakat diperlukan

pemilihan dan pengungkapan secara tepat.

Berkaitan dengan fungsi bahasa, Halliday (1972) mengemukakan fungsi bahasa secara makro sebagai berikut: (1) fungsi ideasional yakni fungsi bahasa sebagai wahana untuk mengekspresikan sesuatu, (2) fungsi interpersonal yakni fungsi bahasa untuk menyampaikan pesan yang dapat meningkatkan hubungan sosial di antara masyarakat, (3) fungsi tekstual yakni fungsi bahasa untuk mengorganisasikan wacana yang relevan dengan situasi. Ketiga fungsi bahasa tersebut relevan dengan fungsi bahasa yang digunakan di media massa, khususnya dalam berita.

Penggunaan bahasa dalam berita umumnya tidak berbeda dengan penggunaannya pada wacana lain. Bahasa dalam berita tidak hanya dipakai sebagai alat untuk mengomunikasikan pesan, tetapi juga digunakan untuk mengonstruksi realitas sosial. Menurut pandangan kaum konstruktivistik, bahasa dalam proses pembentukan realitas telah membantu kaum yang berkuasa untuk melakukan penindasan simbolik atas realitas yang tidak bebas nilai (Artha, 2002:178).

Menurut Siregar (2006:21), setiap komunikasi dengan media massa berpotensi untuk mengubah komunikasi sesuai dengan keinginan komunikator. Media massa menjadi sarana untuk mewujudkan kepentingan dan keinginan komunikator (wartawan) yang berada di balik penulisan berita.

Wartawan menulis berita bukan hanya sebagai penjelas, tetapi turut membentuk realitas sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Ini terjadi karena wartawan tidak dipandang sebagai subjek yang netral namun sebaliknya. Hal seperti ini yang menyebabkan terjadinya ketidaknetralan dalam pemberitaan yang

dapat menimbulkan terjadinya bias. Bias mengandung makna adanya kemungkinan pemberitaan yang cenderung memihak pada kelompok atau golongan tertentu. Menurut Burton (2008:161), bias yang terjadi pada surat-surat kabar terjadi karena tidak ada komunikasi yang netral atau bebas nilai.

Ketidaknetralan dalam penulisan berita tampak dalam pemilihan leksikon. Leksikon yang digunakan dalam berita mengandung kepentingan dan tujuan kelompok-kelompok tertentu, termasuk penanaman ideologi. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan tersebut digunakan untuk melakukan praktik marjinalisasi, pemburuan, bahkan penyerangan terhadap kelompok lain.

Sesuai dengan kode etik jurnalistik, media massa sebagai alat komunikasi seharusnya bersifat netral dan tidak berat sebelah. Kenetralan diperlukan dalam menyampaikan fakta atau peristiwa kepada masyarakat. Media harus objektif dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Objektif bermakna bahwa dalam peliputan berita wartawan tidak berat sebelah dan tidak memihak pada kepentingan tertentu (Nurudin, 2007:262). Menurut Roekhan (2009), keobjektifan dan kenetralan media massa ditentukan oleh ukuran baik-tidak penggalian berita oleh wartawan, baik-tidak penulisan berita, dan baik-tidak pengelolaan berita di meja redaksi sampai dengan penyajian berita tersebut kepada pembaca.

Namun, dalam peliputan dan pelaporan berita, ketidaknetralan dan ketidakobjektifan masih terjadi. Ketidaknetralan dan ketidakobjektifan wartawan tampak dalam pemilihan subjek yang dijadikan narasumber berita, serta penggunaan bahasa dalam berita. Bahasa dalam media massa, khususnya

berita, tidak hanya dipakai sebagai alat untuk mengomunikasikan pesan kepada masyarakat pembaca, tetapi juga digunakan untuk mengonstruksi realitas sosial. Realitas sosial yang dibentuk melalui bahasa bukanlah sesuatu yang bebas nilai, karena konstruksi sosial yang terjadi melalui bahasa sangat ditentukan oleh “penguasa” bahasa itu sendiri.

Berdasar uraian di depan penelitian ini mengaji penggunaan leksikon sebagai alat kekuasaan untuk melakukan praktik marjinalisasi terhadap kelompok lain. Salah satu peran leksikon dalam bahasa berita adalah untuk membuat klasifikasi. Pada dasarnya bahasa selalu menyediakan klasifikasi. Klasifikasi terjadi karena realitas sangat kompleks sehingga orang membuat penyederhanaan dan abstraksi dari realitas tersebut (Fowler, 1991). Dengan klasifikasi dapat dilihat bentuk-bentuk leksikon yang menunjukkan sikap pro dan kontra. Data diambil dari berita dalam media massa cetak yang memuat konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Media massa cetak yang dijadikan sumber dalam kajian ini adalah media cetak nasional yang terbit di Indonesia: *Kompas*, *Jawa Pos*, *Republika*, dan *Media Indonesia*. Fokus yang diangkat dalam tulisan ini adalah peran leksikon sebagai sarana untuk membuat klasifikasi. Tulisan ini bertujuan mengeksplanasikan peran leksikon sebagai sarana untuk membuat klasifikasi.

Pisau bedah yang digunakan untuk mengungkap kepentingan tersembunyi di balik penggunaan leksikon adalah analisis wacana kritis. Menurut Hikam (1999:95), wacana tidak dipahami sebagai studi bahasa semata. Bahasa tidak hanya menggambarkan aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks.

Konteks dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk praktik kekuasaan. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Kartomihardjo (2000:101) menyatakan bahwa analisis wacana kritis berusaha menelaah penggunaan bahasa yang tidak seimbang yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam pemberitaan sehingga ada kelompok-kelompok yang diuntungkan dan yang dirugikan.

Jorgensen (2007:120) mengatakan bahwa analisis wacana kritis merupakan pendekatan kritis yang secara politik ditujukan bagi timbulnya perubahan sosial. Pendekatan ini memihak kelompok sosial yang tertindas. Pengkritik bertujuan menguak peran praktik kewacanaan dalam melestarikan hubungan kekuasaan yang tidak setara dengan tujuan mempercepat hasil analisis wacana kritis untuk memperjuangkan tercapainya perubahan sosial yang radikal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini adalah fenomena kebahasaan yang berbentuk leksikon. Data diambil dari berita media massa cetak. Topik berita yang dijadikan data mengenai konflik perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Empat media yang dijadikan sumber data termasuk dalam kriteria koran terbaik tingkat nasional: *Kompas*, *Jawa Pos*, *Republika*, dan *Media Indonesia*.

Metode pengumpulan data berupa metode dokumentasi. Data teks berita dikumpulkan mulai Oktober 2011 sampai dengan April 2012. Data dianalisis dengan metode analisis wacana yang di dalamnya terdapat dekonstruksi. Metode

analisis wacana yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan dalam analisis wacana kritis. Model analisis wacana yang dikembangkan oleh Fairclough (1995) dijadikan acuan dalam proses penganalisisan data. Analisis wacana model Fairclough (1995:98) mencakup tiga dimensi: (1) teks, (2) praksis kewacanaan, (3) praksis sosiobudaya. Proses analisisnya dilakukan dalam tiga tahap: (a) deskripsi, (b) penafsiran, (c) penjelasan .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bahasa disediakan klasifikasi. Ada beberapa klasifikasi yang disajikan dalam bagian ini. Klasifikasi tersebut didasarkan pada topik berita yang dijadikan fokus penelitian.

Leksikon Penanda Sikap Kontra

Leksikon yang digunakan untuk membentuk klasifikasi khususnya sikap kontra terhadap pemerintah Malaysia, diambil dari berita mengenai konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait dugaan pengambilan sebagian wilayah Indonesia oleh pemerintah Malaysia. Wilayah yang diduga diambil oleh Malaysia adalah Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ada beberapa leksikon yang digunakan untuk menunjukkan kontra atau tidak senang pada pemerintah Malaysia. Karena bahasa yang digunakan berbeda, makna yang dikandungnya membawa implikasi yang berbeda. Beberapa leksikon yang digunakan pada umumnya bermakna disfemisme/sarkasme meskipun tingkatannya berbeda.

Leksikon yang digunakan untuk membuat klasifikasi kontra terhadap pemerintah Malaysia antara lain *pelanggaran batas*, *pergeseran patok penguasaan lahan*, *mencaplok*,

mencomot, *menyerobot*, *merambah* dan *agresi*. Leksikon-leksikon ini merupakan bagian/berhiponim dengan leksikon *mengambil*. leksikon *pelanggaran batas* lebih bermakna eufemisme atau penghalusan daripada *penguasaan lahan*.

- (1) DPR bersikukuh ada *pelanggaran batas*. Wakil Ketua Komisi I DPR Hasanuddin menegaskan, dirinya punya bukti akurat tentang *pelanggaran batas* dan *penguasaan lahan* oleh Malaysia.
- (2) Sebelumnya, Menkopolkam Djoko Suyanto tidak menjawab pertanyaan tentang eksodus warga Kalbar ke Sarawak dalam jumpa pers yang sebagian besar membahas dugaan *pelanggaran batas* oleh Malaysia.

Data (1) dan (2) diambil dari *Kompas*. Leksikon *pelanggaran batas* dan *penguasaan lahan* dipakai media untuk menyudutkan pemerintah Malaysia. Leksikon *pelanggaran batas* lebih netral dibandingkan *penguasaan lahan*. Dalam data (1) leksikon *pelanggaran batas* disejajarkan dengan istilah *penguasaan lahan*. Makna yang dikandung dalam dua istilah tersebut berbeda. Yang pertama dikatakan bahwa Malaysia hanya melanggar batas. *Melanggar batas* bermakna melampaui, melewati, menerjang batas wilayah Republik Indonesia. Ada unsur ketidaksengajaan dalam istilah *melanggar batas*. Apabila pelanggaran tersebut tanpa kesengajaan, pelanggaran tersebut masih bisa dimaafkan. Hal ini berbeda dengan penggunaan istilah *penguasaan lahan*. Dalam istilah ini terkandung makna kesengajaan. Malaysia sengaja ingin menguasai lahan yang bukan miliknya. Efek yang ditimbulkan melalui dua istilah ini akan berbeda karena makna yang terkandung di dalamnya berbeda. Dalam konteks wacana di depan, ada dua hal yang dikontraskan. Yang pertama, Malaysia melakukan kesalahan tanpa sengaja dengan melanggar batas wilayah

RI. Yang kedua, Malaysia sengaja melakukan kesalahan dengan cara menguasai lahan yang bukan miliknya.

Leksikon lain yang digunakan media untuk membuat klasifikasi kontra terhadap pemerintah Malaysia adalah *pergeseran patok*. Sama dengan leksikon *pelanggaran batas*, leksikon ini dipakai media untuk melukiskan perbuatan pemerintah Malaysia dalam kasus dugaan pengambilan wilayah Indonesia di Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat.

(3) Aparat Malaysia dituding diam-diam telah *menggeser patok* penanda perbatasan kedua negara hingga menjorok ke wilayah Indonesia.

(4) Informasi *pergeseran patok* di Camar Bulan dan Tanjung Datu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, hanyalah puncak gunung es dari carut marutnya masalah perbatasan di negeri yang sudah merdeka 66 tahun ini.

Dalam data (3) dan (4), leksikon yang dipakai untuk menyudutkan pemerintah Malaysia adalah *menggeser patok* atau *pergeseran patok*. Leksikon ini digunakan media untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa patok sebagai batas wilayah antara negara Indonesia dan Malaysia telah mengalami pergeseran. Dalam konteks wacana di atas pergeseran tersebut sengaja dilakukan oleh aparat Malaysia. *Menggeser* mempunyai arti memindahkan. Yang dipindahkan adalah patok sebagai penanda batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. *Pergeseran* bermakna *perpindahan* dan berkaitan dengan kata *berpindah*. Dua istilah ini yakni *menggeser* dan *pergeseran* bermakna bahwa perpindahan patok tersebut atau yang menyebabkan patok tersebut berpindah tempat karena ada yang sengaja memindahkannya. Pemerintah Malaysia dituduh dengan sengaja telah memindahkan patok sebagai batas

wilayah antara Indonesia dengan Malaysia.

Leksikon yang bermakna sarkasme atau disfemiasme tampak pada penggunaan *caplok*. Leksikon ini digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap Indonesia.

(5) Negeri Jiran itu disebut telah *mencaplok* batas wilayah dengan Indonesia. Kawasan yang *dicaplok* tersebut berada di dusun Camar Wulan, desa Temajuk, kecamatan Paloh, kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pihak yang mengungkap *pencaplokan* wilayah itu adalah Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanudin.

(6) Malaysia terus merambah wilayah tanah air Indonesia. Perlahan tapi pasti. Setelah sukses mencomot pulau Simpadan dan Ligitan, mereka kini *mencaplok* dusun camar bulan dan Tanjung Datu di Kalimantan Barat.

Dalam data (5) dan (6), leksikon yang digunakan untuk membuat klasifikasi kontra terhadap pemerintah Malaysia adalah *caplok*. Kecuali *Kompas*, media yang menggunakan leksikon ini adalah *Media Indonesia*, *Republika*, dan *Jawa Pos*. Leksikon ini digunakan media untuk memberitakan dugaan pengambilan sebagian wilayah Indonesia yang terletak di Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat oleh pemerintah Malaysia. Kata *caplok* dipilih oleh media (*Jawa Pos*, *Republika*, *Media Indonesia*) untuk membuat klasifikasi sikap kontra terhadap pemerintah Malaysia. Leksikon ini termasuk jenis leksikon binatang. Leksikon ini dihadirkan media untuk memberikan informasi kepada khalayak pembaca pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa Malaysia kembali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah RI. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* *mencaplok* mengandung makna *menelan*, *mengambil*, *merampas*, dll. *Pencaplokan*

bermakna pengambilan dan perampasan. Kata *mencaplok* dalam sebuah kalimat membutuhkan kehadiran subjek dan objek. Dalam data (5), (6), (7), dan (8) yang menjadi subjek/pelaku dari tindakan *mencaplok* adalah Malaysia. Yang menjadi objek/yang dikenai tindakan adalah wilayah Indonesia. Leksikon ini berdampak pemburuan terhadap kelompok lain. Tujuan penggunaan leksikon ini untuk memberikan informasi sepihak kepada masyarakat Indonesia bahwa Malaysia kembali melakukan perbuatan tidak terpuji dengan merampas, mengambil, melakukan perampasan sebagian wilayah Indonesia, seperti yang sebelumnya pernah dilakukan terhadap Simpadan dan Ligitan.

Selain *caplok*, leksikon *comot* juga dipakai untuk menggambarkan tindakan Malaysia dalam rangka pengambilan sebagian wilayah Indonesia di perbatasan.

- (7) Malaysia terus merambah wilayah tanah air Indonesia. Perlahan tapi pasti. Setelah sukses *mencomot* pulau Simpadan dan Ligitan, mereka kini mencaplok dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu di Kalimantan Barat (MIA1-aa)

Dalam data (7) leksikon *comot* digunakan oleh *Media Indonesia* untuk menyebut tindakan Malaysia dalam rangka menguasai sebagian wilayah Indonesia di perbatasan. *Mencomot* digunakan untuk menggambarkan keberhasilan Malaysia mengambil pulau Simpadan dan Ligitan. Dua pulau yang sebelumnya diklaim milik Indonesia berhasil diambil alih oleh Malaysia melalui sidang Mahkamah Internasional. Dalam KBBI *mencomot* bermakna mengambil, meraup. Jika dibandingkan dengan *mengambil*, leksikon *mencomot* bernilai rasa negatif. Leksikon ini digunakan *Media Indonesia* untuk menjelekkkan pemerintah Malaysia. Leksikon ini menimbulkan kebencian

terhadap pemerintah asing akan dirasakan khalayak pembaca, khususnya masyarakat Indonesia.

Selain leksikon *caplok* dan *comot* leksikon yang digunakan untuk membuat klasifikasi kontra pada pemerintah Malaysia adalah *serobot*. Leksikon juga bermakna disfemisme/pengasaran. Leksikon ini dipakai untuk menggambarkan tindakan Malaysia yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap batas wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

- (8) Negeri Jiran telah disebut-sebut *menyerobot* batas wilayah dengan
 (9) Saya jadwalkan hari ini ada pernyataan resmi pemerintah (Kemendagri) terkait dengan kabar *penyerobotan* ini.

Dalam data (8) dan (9) leksikon yang digunakan untuk membuat klasifikasi rasa tidak senang terhadap pemerintah Malaysia adalah *serobot*. Leksikon ini digunakan oleh *Jawa Pos* untuk menggambarkan tindakan Malaysia yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap batas wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kata *menyerobot* dan *penyerobotan* dipilih oleh *Jawa Pos* untuk mendeskriminasikan atau menjelekkkan pemerintah Malaysia. *Menyerobot* dan *penyerobotan* bermakna mengambil/pengambilan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sama halnya dengan *mencaplok*, kata *menyerobot* dalam sebuah kalimat membutuhkan kehadiran subjek dan objek. Yang menjadi subjek/pelaku tindakan adalah Pemerintah Malaysia dan yang menjadi objek tindakan adalah Wilayah Indonesia. Dalam hal ini bahasa berfungsi sebagai media informasi. Leksikon ini dihadirkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Malaysia telah megambil sebagian wilayah Indonesia tanpa sepengetahuan pemiliknya. Makna

yang dikandung dalam leksikon tersebut adalah Malaysia telah mencuri atau melakukan pencurian terhadap wilayah Indonesia. Secara tidak langsung, leksikon ini digunakan untuk menjelekkan kelompok lain.

Leksikon yang memiliki makna hampir sama dengan *meyerobot* adalah *merambah*.

- (10) Malaysia terus *merambah* wilayah tanah air Indonesia. Perlahan tapi pasti. Setelah sukses mencomot pulau simpadan dan Ligitan, mereka kini mencaplok dusun camar bulan dan Tanjung Datu di Kalimantan Barat.

Leksikon *merambah* digunakan Media Indonesia untuk menggambarkan tindakan Malaysia dalam rangka perluasan wilayah negara. Dalam KBBI *merambah* bermakna *menebang, masuk, membabat, menerobos*. Leksikon ini biasanya digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan orang saat ingin menguasai lahan dengan membuka hutan. Istilah *merambah hutan* bermakna membabat/membuka hutan. Penggunaan leksikon ini menimbulkan makna bahwa Malaysia ingin mengadakan perluasan wilayah negaranya dengan memasuki wilayah negara Indonesia.

Leksikon yang lebih ekstrem lagi untuk menggambarkan perbuatan pemerintah Malaysia terhadap Indonesia dalam kasus Camar Bulan dan Tanjung Datu adalah *agresi*. *Agresi* termasuk dalam jenis leksikon perang, karena digunakan dalam peperangan.

- (11) Tindakan Malaysia sudah jelas *agresi* diam-diam. Pemerintah RI sudah harus meninggalkan *soft diplomacy* terhadap Malaysia,"tegas Mahfuds.

Istilah *agresi* dalam data (11) bermakna penyerangan atau penyerbuan. Leksikon ini digunakan oleh *Media Indonesia* sebagai sarana informasi. *Agresi* selalu

digunakan oleh militer untuk melakukan penyerangan dalam upaya menduduki wilayah suatu negara yang bukan menjadi miliknya, misalnya agresi yang telah dilakukan militer Belanda ketika menduduki wilayah Indonesia atau agresi yang dilakukan Amerika terhadap Irak. Penggunaan leksikon ini menunjukkan makna bahwa Malaysia ingin menguasai wilayah Indonesia.

Leksikon *caplok, serobot, comot, rambah, dan agresi* digunakan oleh beberapa media antara lain *Republika, Jawa Pos, dan Media Indonesia*. Leksikon ini digunakan untuk membuat klasifikasi anti terhadap pemerintah Malaysia. Leksikon-leksikon ini berhiponim dengan *mengambil*. Dibandingkan dengan *mengambil*, leksikon *mencaplok, menyerobot, mencomot, merambah* lebih bernilai rasa/berkonotasi negatif. Leksikon-leksikon tersebut digunakan untuk menunjukkan kejengkelan terhadap sikap pemerintah Malaysia.

Hal yang biasa terjadi dalam budaya dan kehidaupan sosial di masyarakat Indonesia, untuk menunjukkan sikap jengkel atau marah biasanya pilihan kata atau leksikon yang digunakan bernilai rasa negatif atau disfemisme. Tidak terkecuali masyarakat Jawa, ketika rasa jengkel itu muncul maka mereka cenderung menggunakan bahasa yang bermakna disfemisme. Bahasa yang bermakna disfemisme dipilih dari ragam bahasa daerah. *Comot* dan *caplok* merupakan dua istilah yang dekat dengan bahasa Jawa. Masyarakat Jawa sebagai pembaca akan memahami alasan kedua istilah tersebut digunakan.

Hal yang berbeda dilakukan oleh *Kompas*. *Kompas* lebih berhati-hati dalam menyebut tindakan yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap wilayah Indonesia. Istilah yang digunakan adalah

pergeseran patok. Kehati-hatian yang dilakukan *Kompas* dalam menyebut tindakan yang dilakukan pemerintah Malaysia dikarenakan penyebab adanya pergeseran patok sebagai batas wilayah antara dua negara disinyalir karena peristiwa alam. Dengan demikian *Kompas* tidak ingin melakukan tuduhan tanpa dasar kepada pemerintah Malaysia.

Kehati-hatian tersebut dilakukan tidak terlepas dari peristiwa sengketa dua pulau yang sebelumnya diklaim milik Indonesia. Karena bukti yang dimiliki Indonesia cukup lemah maka melalui sidang di Mahkamah Internasional dua pulau tersebut berpindah tangan. Tidak ingin mengulangi peristiwa yang sama, *Kompas* menyebut kasus yang terjadi di Camar Bulan dan Tanjung Datu adalah *pergeseran patok*.

Leksikon *caplok*, *serobot*, *comot*, *rambah* bermakna disfemisme atau pengasaran. Leksikon-leksikon tersebut digunakan oleh kelompok dominan/kelompok sendiri untuk menjelekkan kelompok lain (Eriyanto, 2005). Pesan yang ingin disampaikan melalui leksikon-leksikon ini berupa pesan-pesan ideologi. Malaysia adalah sebuah negara yang tidak baik. Malaysia selalu melakukan pelanggaran, dan kecurangan terhadap Indonesia, seperti yang pernah terjadi pada kasus-kasus sebelumnya antara pemerintah Indonesia dan Malaysia Dua wilayah Indonesia yang akhirnya menjadi wilayah Malaysia adalah Simpadan dan Ligitan. Secara tidak sadar ideologi nasionalisme ditanamkan oleh media melalui leksikon-leksikon ini. Efek yang terjadi adalah munculnya semangat nasionalisme pada diri pembaca dan masyarakat Indonesia, begitu mengetahui kedaulatan wilayahnya diambil oleh negara lain.

Makna yang dihadirkan melalui kata kata seperti *caplok*, *serobot*, *comot*,

melanggar batas, bahkan *agresi* bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Kata-kata tersebut dihadirkan dengan tujuan tertentu, yakni pemburukan dan pamarjinalan terhadap kelompok lain. Dalam kasus Tanjung Datu dan Camar Bulan, kelompok yang diburukkan dan dimarjinalkan adalah Pemerintah Malaysia. Makna yang dihadirkan melalui kata-kata ini adalah makna yang sesuai dengan kepentingan media, bahkan kepentingan kelompok tertentu yakni Pemerintah Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya bias dalam pemberitaan (Eriyanto, 2005).

Wacana yang dominan dalam kasus dugaan pelanggaran batas wilayah Indonesia di Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat adalah wacana yang menyudutkan dan menjelekkan pemerintah Malaysia. Wacana ini menjadi wacana dominan, karena secara umum media memberitakan adanya dugaan pengambilan wilayah Indonesia oleh pemerintah Malaysia, dengan menggunakan leksikon *caplok*, *serobot*, *comot*, *pelanggaran batas*. Leksikon yang lebih keras lagi adalah *agresi*. Wacana yang terpinggirkan adalah wacana dari pihak pemerintah Malaysia. Media cenderung berpihak pada wacana dominan dan mengesampingkan wacana yang lain. Hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam pemberitaan. Ketidakseimbangan ini yang akhirnya memunculkan terjadinya bias (Burton, 2008; Artha, 2002). Bias dapat mengakibatkan adanya kelompok-kelompok tertentu yang diuntungkan dan yang lain dirugikan. Kelompok yang dirugikan dengan adanya pemberitaan ini adalah Pemerintah Malaysia.

Leksikon Penanda Sikap Pro

Dalam kasus dugaan pelanggaran batas wilayah Indonesia di Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat oleh pemerintah Malaysia, banyak pihak yang merasa *geregetan* dengan perilaku Malaysia. Hal ini disebabkan penggunaan leksikon-leksikon tertentu yang menyudutkan dan mendeskriminasikan pemerintah Malaysia. Leksikon-leksikon tersebut di antaranya *caplok*, *serobot*, *comot*, *rambah*, *pelanggaran batas*, *pergeseran patok*, dan *agresi*. Namun demikian, wacana yang telah menyudutkan pemerintah Malaysia, tidak serta merta diterima begitu saja. Ada beberapa pihak yang menggulirkan wacana untuk menentang wacana dominan. Pihak yang berusaha mematahkan wacana yang mendeskriminasikan Pemerintah Malaysia berasal dari kelompok sendiri, bukan dari pemerintah Malaysia.

Pembelaan terhadap pemerintah Malaysia dilakukan oleh pihak sendiri. Yang dimaksud pihak sendiri adalah beberapa pejabat pemerintah Indonesia. Beberapa pejabat pemerintah melakukan pembelaan dengan menyangkal pendapat yang dikemukakan Anggota Komisi I DPR. Penyangkalan tersebut dilakukan dengan menggunakan bentuk negatif, yakni *bukan/tidak*. Leksikon yang digunakan di antaranya *bukan pencaplokan/tidak mencaplok*.

- (12) Dalam kasus Camar Bulan, kata Juliarti, *tidak ada pencaplokan* wilayah.
- (13) Di kesempatan terpisah, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis menyatakan wilayah seluas 1.499 ha di Camar Bulan itu *bukan dicaplok* oleh Malaysia, melainkan diserahkan secara sukarela oleh pemerintah Indonesia di tahun 1978.

Leksikon *pencaplokan* dipertentangkan dengan *bukan pencaplokan*. Leksikon ini digunakan untuk mematahkan wacana

yang menuduh pemerintah Malaysia telah mencaplok sebagian wilayah Indonesia di Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Melalui leksikon ini ada wacana yang sengaja digulirkan untuk menentang wacana yang menyudutkan pemerintah Malaysia. Pihak yang dengan keras berbicara bahwa kasus Camar Bulan dan Tanjung Datu *bukan pencaplokan* adalah Menkopolkam Djoko Suyanto. *Republika* dan *Jawa Pos* mewadahi pernyataan Djoko Suyanto. Djoko Suyanto tidak berbicara atas namanya sendiri sebagai pribadi, namun atas nama institusi atau profesinya sebagai Menkopolkam. Dalam hal ini bahasa digunakan sebagai media informasi sekaligus klasifikasi. Dengan menggunakan istilah *bukan pencaplokan*, Suyanto ingin menegaskan sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia, bahwa Malaysia *tidak mencaplok* sebagian wilayah Indonesia. Suyanto ingin menginformasikan bahwa tidak ada wilayah Indonesia yang diambil oleh Malaysia.

Pihak berikutnya menunjukkan sikap pro terhadap pemerintah Malaysia adalah Menteri Dalam Negeri Gunawan Fauzi. Dalam wacana di depan, Fauzi menganggap pihak sendiri melakukan tuduhan yang tidak berdasar pada Malaysia. Dalam hal ini bahasa berperan sebagai alat untuk menyampaikan pesan yang dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan sosial di antara anggota masyarakat (Haliday, 1972). Melalui wacana di atas Fauzi ingin menegaskan supaya masyarakat supaya jangan teburu-buru melakukan tuduhan pencaplokan pada Malaysia, karena hal tersebut dapat membuat hubungan antara Indonesia dengan Malaysia menjadi retak. Fauzi tidak berbicara atas

namanya sendiri sebagai pribadi, tetapi atas nama institusi atau profesinya sebagai menteri dalam negeri.

Ada yang lebih keras lagi melakukan pembelaan terhadap pemerintah Malaysia. Leksikon *tidak mencaplok* dikatakan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis (data 13). Sama dengan yang dikatakan oleh Menkopolkam Djoko Suyanto, dan Menteri Dalam Negeri, Gunawan Fauzi, Cornelis juga menegaskan bahwa Malaysia tidak mencaplok wilayah Indonesia. Ada hal yang berbeda dengan pandangan keduanya. Cornelis justru menuduh pemerintah Indonesia telah menyerahkan secara suka rela kedua wilayah tersebut pada tahun 1978. Oleh Cornelis bahasa digunakan sebagai media informasi. Melalui istilah *tidak dicaplok*, dan *penyerahan wilayah* Cornelis ingin menginformasi bahwa Malaysia tidak pernah mengambil kedua wilayah tersebut, karena wilayah tersebut telah diserahkan dengan sukarela oleh pemerintah Indonesia tahun 1978. Selain sebagai media informasi, bahasa digunakan oleh Cornelis sebagai alat untuk menjelekkan kelompok sendiri. Melalui istilah *penyerahan wilayah*, Cornelis menyalahkan pemerintah sendiri yang telah menyerahkan sebagian wilayahnya.

Bentuk negatif lain yang digunakan untuk membela kepentingan pemerintah Malaysia dalam kasus dugaan pelanggaran batas wilayah Indonesia adalah *bukan pergeseran*. Leksikon ini digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak ada upaya dari pemerintah Malaysia untuk melanggar batas wilayah dua negara.

(14) Menurut Julian sampai sejauh ini, kabar Malaysia *menggeser* tapal batas di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Sambas Kalimantan Barat *tidak benar*. (KA1-bc)

(15) Menteri Luar Negeri menambahkan tidak ada perpindahan patok di perbatasan Indonesia-Malaysia. “Ada abrasi laut yang menghilangkan patok A1 di Tanjung Datu. Demikian pula ada kerusakan patok lain, namun *tak ada penggeseran* patok oleh pihak lain secara sengaja. (KA1-bc)

Data (14) dan (15) diambil dari Kompas. Dalam data (14) dan (15) leksikon *tidak menggeser* dan *bukan pergeseran patok* diungkapkan oleh Juru Bicara Kepresidenan Julian, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Bahasa oleh keduanya digunakan sebagai alat untuk mengklarifikasi adanya dugaan pelanggaran batas wilayah oleh pemerintah Malaysia. Mereka berbicara bukan atas nama individu, melainkan mewakili institusi profesi, yakni sebagai juru bicara kepresidenan, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan. Ketiganya ingin menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran batas maupun pergeseran patok secara sengaja oleh pemerintah Malaysia. Walaupun ada pergeseran patok hal itu disebabkan faktor alam, bukan karena kesengajaan. Oleh ketiganya leksikon-leksikon tersebut digunakan untuk membela kelompok lain dan menyudutkan kelompok sendiri.

Faktor alam yang menyebabkan pergeseran patok batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu adalah *abrasi*. Leksikon ini digunakan sebagai penguat adanya faktor penyebab pergeseran patok.

(16) Julian menuturkan, pergeseran secara sengaja tapal batas oleh pihak tidak teridentifikasi, kecuali karena tapal itu tidak terlihat akibat *abrasi* air laut. (KA1-bd)

(17) Menurut Marty, berdasarkan hasil tim survei yang turun langsung melihat ke lapangan diambil kesimpulan bahwa patok batas Camar Bulan dan Tanjung Datu terkena *abrasi* air laut. (MIA1-bd)

Dalam data (16), (17) leksikon *abrasi* digunakan sebagai dasar bahwa terjadinya pergeseran patok bukan karena kesengajaan, ataupun ulah manusia. Pergeseran patok dikarenakan faktor alam. Digunakannya istilah *abrasi* timbul kesan bahwa pergeseran patok disebabkan faktor alam, yakni pengikisan air laut. Pergeseran tersebut tidak disebabkan ulah manusia. Leksikon ini digunakan untuk membela kepentingan pemerintah Malaysia.

Pembelaan terhadap pemerintah Malaysia yang ditunjukkan dengan sikap pro oleh pihak-pihak tertentu dilakukan bukan tanpa tujuan. Pembelaan tersebut dilakukan dengan menggunakan bentuk negatif *bukan* dan *tidak*. Bentuk negatif tersebut ditambahkan di belakang kata *pencaplokan*. Yang disampaikan beberapa pejabat pemerintah terkait dugaan *pencaplokan* sebagian wilayah Indonesia di Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat dilakukan tidak hanya untuk membela kepentingan pemerintah Malaysia, tetapi juga kepentingan pemerintah Indonesia.

Dari kasus dugaan pelanggaran batas wilayah di Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat oleh pemerintah Malaysia, wacana dominan yang muncul adalah bahwa Malaysia telah melakukan pelanggaran batas wilayah ke dua negara. Leksikon yang digunakan untuk membuat klasifikasi kontra pada Pemerintah Malaysia antara lain *pencaplokan*, *penyerobotan*, *pelanggaran batas*, *penguasaan lahan*, dan *agresi*. Leksikon-leksikon ini digunakan untuk memarjinalkan, menjelekkkan kelompok lain. Ada beberapa kelompok membela wacana yang terpinggirkan. Wacana yang diangkat adalah bahwa tidak ada pelanggaran batas wilayah oleh Malaysia. Leksikon yang dioposisikan dengan

leksikon *pencaplokan*, dan *pelanggaran batas* adalah *bukan pencaplokan* dan *bukan pelanggaran batas*. Leksikon *bukan pencaplokan* dan *bukan pelanggaran batas* telah meruntuhkan leksikon *pencaplokan* dan *pelanggaran batas*. Dalam dekonstruksi ditunjukkan bagaimana oposisi yang demikian agar tetap berada ditempatnya, terkadang justru membalik atau meruntuhkan dirinya sendiri (Eagleton, 2007). Sikap pro terhadap kelompok lain dimaksudkan untuk menyelamatkan pemerintah Indonesia di dunia Internasional, setelah beberapa kasus mengenai dugaan pelanggaran batas dengan pemerintah asing akhirnya pemerintah Indonesia yang mendapat malu. Hal ini juga dimaksudkan sebagai usaha pemertahanan para pejabat pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI.

Pernyataan yang selama ini disampaikan di banyak media mengenai adanya dugaan pelanggaran batas wilayah Indonesia oleh pemerintah Malaysia diruntuhkan oleh pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran batas oleh pemerintah Malaysia. Dalam kasus ini, kelompok yang tidak dominan diangkat. Malaysia yang selama ini sering berseberangan dengan pemerintah Indonesia dalam beberapa kasus mendapat pembelaan dari beberapa pejabat Indonesia. Dalam wacana dominan, terdapat tempat untuk wacana minor. Tidak sepenuhnya wacana dominan mendominasi wacana yang terpinggirkan. Media juga memberikan tempat dan ruang gerak bagi wacana minor (Culler, 1983, Pradopo, 2001). Selain dipakai untuk membuat klasifikasi, bahasa juga dipakai sebagai sarana pertarungan wacana (Eriyanto, 2005).

SIMPULAN

Leksikon sebagai sarana untuk membuat klasifikasi dibedakan antara yang pro dan kontra. Leksikon yang menunjukkan sikap kontra digunakan untuk melakukan pemburuan terhadap kelompok lain, sedangkan yang pro digunakan untuk membela kepentingan kelompok lain dan menyudutkan kelompok sendiri. Beberapa leksikon yang dipakai untuk membuat klasifikasi bermakna eufemisme, dan disfemisme meskipun tingkatannya berbeda. Selain digunakan untuk membuat klasifikasi leksikon-leksikon tersebut digunakan untuk pertarungan wacana.

DAFTAR PUSTAKA

- Artha, Arwan Tuti. 2002. *Bahasa, Wacana Demokrasi dan Pers*. Yogyakarta: AK Group.
- Burton, Graeme. 2008. *Yang Tersembunyi di Balik Media: Pengantar Kepada Kajian Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Culler, Jonathan. 1981. *Literary Theory: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Eagleton, Terry. 2007. *Teori Sastra: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Alih basa: Harifah Widiawati. Yogyakarta: Jalasutra.
- Eriyanto. 2005. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Fowler, Roger. 1991. *Language in the News: Discourse and Ideology in the Press*. London and New York: Routledge.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Halliday, M.A.K. 1972. "Language Structure and Language Function" dalam John Lyons. Hal 140-145. London: Longman.
- Hikam, Mohamad As. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Jorgensen, Mariane W dan Loise J. Philips. 2007. *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Penerjemah: Imam Suyitno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartomihardjo, Soeseno. 2000. Kekuasaan dalam Bahasa (Artikel dipublikasikan dalam Kajian Serba Linguistik) editor: Bambang kaswanti Purwo. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Grafindo Persada
- Pradopo, Rachmat Djoko. Dkk. 2001. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widia.
- Roekhan. 2009. *Kekerasan simbolik di Media Massa*. (Disertasi tidak dipublikasikan). Malang: Universitas Negeri Malang.
- Siregar, Ashadi. 2006. *Media Massa dan Pemberitaan: seputar konflik Sosial dan Orientasi Jurnalisme di Indonesia*. (online). (<http://www.forum-rektor.org/artikel.php?hal=2&no=29>, diakses tanggal 05-03-2011).